



Pemkot Prioritaskan Penanganan Inflasi dan P3DN

KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta Sumadi akan memprioritaskan penanganan beberapa persoalan pada tahun 2023. Prioritas pada penanganan inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan pengangguran.

Ketiga hal itu diprioritaskan karena menjadi catatan dalam evaluasi kinerja pejabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar Kemendagri secara daring pada Selasa (31/1). Persoalan inflasi, P3DN dan pengangguran akan menjadi evaluasi Pemkot Yogyakarta.

“Itu menjadi bagian evaluasi kita. Itu menjadi prioritas di 2023 untuk bisa ditekan terus,” kata Sumadi ditemui usai mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah secara daring di Ruang Yudhistira Balai

Kota Yogyakarta, Selasa (1/2). APBD 2022, realisasi pendapatan 104,28 persen

“Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di kota di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo, dan Kranggan. Jadi kelihatan tinggi.

Sumadi
Penjabat Walikota Yogyakarta

Kota Yogyakarta, Selasa (1/2). APBD 2022, realisasi pendapatan 104,28 persen

di atas rata-rata pendapatan nasional 97,03 persen dan realisasi belanja 89,12 persen di atas rata-rata belanja nasional 87,63 persen. Sedangkan inflasi per Desember 2022 pada angka 6,49 persen di atas inflasi nasional 5,51 persen.

“Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di kota di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo, dan Kranggan.

■ Baca PEMKOT... Hal II



SUASANA: Evaluasi kinerja penjabat kepala daerah secara daring di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (1/2).

Pemkot Prioritaskan Penanganan Inflasi dan P3DN

sambungan dari hal Joglo Jogja

Jadi kelihatan tinggi,” tambahnya. Sedangkan tingkat kemiskinan sebanyak 3.010 jiwa atau 0,67 persen di bawah target rata-rata nasional kab/kota 2,64 persen. Untuk persentase stunting 13,8 persen di bawah rata-rata nasional 21,6 persen. Realisasi P3DN sebanyak 25,71 persen di bawah target nasional 40 persen serta pengangguran 7,18 persen di atas rata-rata nasional 5,86 persen. “Untuk produk dalam negeri, informasi yang kita

dapatkan banyak yang belum bisa di-upload, sehingga kita belum bisa semuanya. Selanjutnya pengangguran akan kita coba sisir kembali angka (data) yang belum diolah,” terang Sumadi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penjabat kepala daerah. Hasil evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dari Kemendagri diharapkan menjadi pijakan

dalam melangkah pada tahun 2023 agar menjadi perhatian. Tito berharap penjabat kepala daerah memiliki kinerja yang lebih baik karena diangkat dari pejabat struktural pemerintah. “Evaluasi menjadi masukan bagi Kemendagri untuk memperpanjang atau melakukan pergantian. Ini bukan menakut-nakuti, tapi untuk memotivasi. Yang penting jangan sampai terlibat hukum, terutama korupsi,” tegas Tito. (hms/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005